



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**DPMPPTSP**

No. Seri : 18954

**IZIN OPERASIONAL**  
**SATUAN PENDIDIKAN PAUD/TK/KOBER**

**Diberikan Kepada**  
**Nama Lembaga** : YAYASAN DARUT THOLIBIN INSAN REJEKI  
**Nama Satuan Pendidikan** : KB. AL-MUSTOFA  
**Ketua Satuan Pendidikan** : SITI NURJANAH, S.Pd  
**Jenis Layanan** : PENDIDIKAN NON FORMAL - KELOMPOK BERMAIN  
**Alamat Lembaga** : Jl. Sinar Rejeki  
**Desa** : Sinar Rejeki  
**Kecamatan** : Jati Agung  
**Kabupaten** : Lampung Selatan  
**Provinsi** : Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 500.16.7.2/0041/SPNF-  
 L/IV.17/VIII/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 tentang pemberian IZIN Operasional Satuan Pendidikan  
 PAUD/TK.

Masa Berlaku Izin Operasional : 29 Agustus 2028

DIKELUARKAN DI : KALIANDA  
 PADA TANGGAL : 29 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



**RIO GISMARA, SH**  
 NIP. 19850320 201001 1 011





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**DMPPTSP**

No. Seri :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DMPPTSP)  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
 Nomor :500.16.7.2/0041/SPNF-L/IV.17/VIII/2025  
 TENTANG  
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
 SATUAN PENDIDIKAN PAUD/TK  
 YAYASAN DARUT THOLIBIN INSAN REJEKI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
 (DMPPTSP)**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan satuan pendidikan PAUD/TK yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin operasional satuan pendidikan PAUD/TK dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 28 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatik** : 1. Surat Permohonan : SITI NURJANAH, S.Pd Tanggal 28 Agustus 2025 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Non Formal.
2. Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan: 421/1858/IV.02/2025 Tanggal 2025-08-25.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan izin operasional Satuan Pendidikan PAUD/TK kepada :
- Nama SPNF : YAYASAN DARUT THOLIBIN INSAN REJEKI
  - Ketua Lembaga : SITI NURJANAH, S.Pd
  - Program Layanan : PENDIDIKAN NON FORMAL - KELOMPOK BERMAIN
  - Alamat Lembaga : Jl. Sinar Rejeki
  - Desa : Sinar Rejeki
  - Kecamatan : Jati Agung
  - Kabupaten : Lampung Selatan
- KEDUA :** Pemegang Izin Operasional PAUD/TK sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :
1. Wajib, menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup SPNF, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan Negara.
  4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan cq. Kepala Bidang Paud Dikmas.
- KETIGA :** Apabila pemegang Izin Operasional PAUD/TK tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan izin Operasional Penyelenggaraan PAUD/TK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KE EMPAT :** Masa berlaku Izin Operasional PAUD/TK sebagaimana diktum Kesatu selama 3 (TIGA) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani IZIN Operasional SPNF dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan
- KELIMA :** Perpanjangan izin PAUD/TK sebagaimana diktum keempat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- KE ENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KALIANDA  
PADA TANGGAL : 29 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



**RIO GISMARA, SH**  
NIP. 19850320 201001 1 011



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.